

DAFTAR PUSTAKA

- Aalin', Elmi Rakhma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2011-2016)". *Jurnal Riset Akutansi*. Vol. 3 No. 1 April 2018. Hal 1-9.
- Ariesta, Ristra Putri dan Lyna Latifah. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang". *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2017. Hal. 173-187.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2018. "Realisasi Penerimaan Negara 2007-2018", <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html>, diakses pada 26 Oktober 2018 pukul 17.17.
- Badan Pusat Statistik. "Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 Tumbuh 5,19 Persen", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017-tumbuh-5-19-persen-html>, diakses pada 18 Januari 2019 Pukul 16.52.
- CNN Indonesia. "Diskon Pajak UMKM dan Investasi Politik Jokowi", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628142904-532-309809/diskon-pajak-umkm-dan-investasi-politik-jokowi>, diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 18.43.
- CNN Indonesia. "Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20171115161037-78-255819/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online>, diakses pada 27 November 2018 Pukul 14.04.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Forum Pajak Indonesia. "PPH Final UMKM: Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018", www.forumpajak.org/pph-final-umkm-perbedaan-pp-46-tahun-2013-dengan-pp-23-tahun-2018/, diakses pada 17 Agustus 2018 Pukul 08.17.

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Ni Putu Milan Novita dan Naniek Noviani. 2016. "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan e-Billing dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 15 No. 2 Mei 2016. Hal. 1001-1028.
- Handoko, Iwan, Hasdi Aimon dan Efrizal Sofyan. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Penerimaan Pajak di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. III No. 5 Juli 2015. Hal. 1-13.
- Herman. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai". *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*. Vol. 7 No. 1 April 2007. Hal. 83-105.
- <https://goo.gl/forms/f5eDMUxV4bdJW1PV2>
- Kastolani, dan Ardiyanto. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *Diponegoro journal of accounting*. Vol. 6 No. 3 2017. Hal. 1-10.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "APBN-2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia", <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses pada 26 Oktober 2018 pukul 17.26.
- Keziana, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Y. 2017. "Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. Hal. 1-14.
- Liputan6. "Sri Mulyani Malu Tax Ratio RI rendah", <https://www.google.com/amp/3611841/sri-mulyani-malu-tax-ratio-ri-rendah?espv=1>, diakses pada 17 Januari 2019 Pukul 17.45.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro. 2018. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak". *Jurnal Riset dan Akuntansi Bisnis Airlangga*. Vol. 3 No. 1 Mei 2018. Hal. 372-395.
- Marketplus. "Klik 46 Aplikasi Kasir Online dan Mempermudah UMKM Membayar Pajak", www.marketplus.co.id/2017/12/klik-46-aplikasi-kasir-online-dan-mempermudah-umkm-membayar-pajak/, diakses pada 17 Agustus 2018 Pukul 09.15.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Kementerian Keuangan. Jakarta.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Sekretariat Kementerian Keuangan. Jakarta.

Merdeka.com. “Penuhi target kepatuhan pajak, DJP Jateng II terapkan strategi jemput bola”,
<https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/uang/penuhi-target-kepatuhan-pajak-djp-jateng-ii-terapkan-strategi-jemput-bola.html?espv=1>, diakses pada 31 Januari 2018 Pukul 14.36.

Muhammad, Arfaningsih dan Sunarto. 2018. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015”. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 2 No.1 April 2018. Hal. 37-45.

Nopiana, Puspita Rama dan Erni Yanti Natalia. 2018. “Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau”. *Jurnal Benefita*. Vol. 3 No. 2 Juli 2018. Hal. 277-290.

Norsain, dan Abu Yasid. “Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal PERFORMANCE*. Vol. IV No. 2 September 2014. Hal. 1-13.

Nuzula, Firdausi, Siti Ragil Handayani dan Devi Farah Azizah. 2015. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan*. Vol. 6 No. 2 2015. Hal. 1-9.

Online Pajak. “7 Poin Penting dalam PP 23/ 2018 tentang PPh Final 0,5%”,
<https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05>, diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 17.26.

Onlinepajak. “PajakPay: Solusi Mudah dan Aman Buat e-Billing dan Setor Pajak Online dengan 1 Klik”, <https://www.online-pajak.com/e-billing-pajakpay>, diakses pada 17 Agustus 2018 Pukul 09.10.

Ortax. “Tarif dan Fasilitas Badan”,
www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=79, diakses pada 27 Oktober 2018 pukul 16.45.

Pajak. “Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018”, www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018?lang=en, diakses pada tanggal 26 September 2018 Pukul 10.17.

- Pajak. "Memperbaiki Kinerja Tax Ratio: Sebuah Pendekatan Makro", <https://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro>, diakses pada 17 Januari 2019 Pukul 17.56.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahmawati, Dwi dan Bety Nur Achadiyah. 2016. "Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Pasuruan)". *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 3 No. 3 Januari 2016. Hal. 207-214.
- Ramdhani, Neila. 2011. "Penyusunan Alat Pengukur Berbasis *Theory of Planned Behaviour*". *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*. Vol. 19 No. 2 2011. Hal. 55-69.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resyniar, Gandhys. 2013. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013".

Robbins, SP dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Buku 2. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Siregar, Dian Lestari. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam". *Jurnal of Accounting & Management Innovation*. Vol. 1 No. 2 Juli 2017. Hal. 119-128

SPSS Indonesia. "Cara Uji Paired Sample t-test dan Interpretasi dengan SPSS", <https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html?m=1>, diakses pada 9 Desember 2018 Pukul 13.42.

Statistikian. "Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel", <https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html?espv=1>, diakses pada 5 Januari 2019 Pukul 09.17.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat belas. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, dan Ika Septiani Putri. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 1 Juni 2017. Hal. 49-56.

Tawas, Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, dan Robert Lambey. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 4 Desember 2016. Hal. 912-921.

- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening*". *Jurnal Nominal*. Vol. VII No. 1 2018. Hal. 33-54.
- Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, Dewi Muhharromah, Syska Lady Sulistyowatie, dan Imam Santosa. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua". *Kiat Bisnis*. Vol. 6 No. 5 Juni 2017. Hal. 402-416.